

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suatu permasalahan terhadap ketenagakerjaan, ketenagakerjaan dianggap sebagai suatu masalah yang signifikan dikarenakan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang ada. . Hal ini tentu perlunya suatu pembangunan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat suatu wilayah maupun tingkat nasional. Pembangunan suatu daerah maupun suatu negara tidak terlepas dari interaksi beberapa variabel, baik berupa modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan lain lain. Tentunya suatu pembangunan ekonomi tidak terlepas dari peran manusia sebagai tenaga kerja.

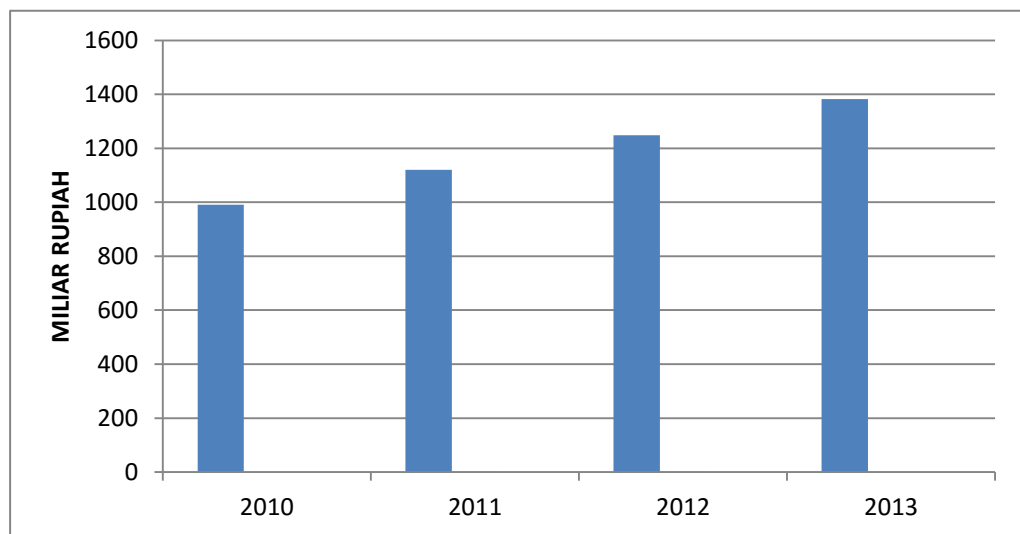
Dilihat dari keadaan pasar tenaga kerja yang ada di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Pada tahun 2016 diketahui jumlah penduduk Indonesia sekitar 261,1 juta jiwa, diantaranya 125,4 juta jiwa tergabung dalam angkatan kerja. Sedangkan jumlah lapangan pekerjaan baru tahun 2015 sekitar 2.886.288 juta, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 sekitar 2.448.915 juta, serta mengalami kenaikan pada tahun 2017 sekitar 2.669.469 juta jiwa. (Putri & Soelistyo, 2018).

Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan hal ini dikarenakan berbagai faktor ekonomi, salah satunya adalah kenaikan upah disetiap kabupaten dan kota serta banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dikarenakan pengusaha banyak membuka pekerjaan baru. Tingginya jumlah output yang ada di Jawa Timur juga mempengaruhi banyaknya investasi yang masuk di dalam kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pada UU no 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan buruh, dijelaskan mengenai pembangunan nasional yang dilaksanakan mengenai pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya serta pembangunan masyarakat Indonesia yang seluruhnya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahterah, adil, makmur yang merata baik spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui potensi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu, peran kota maupun provinsi dalam mendukung perekonomian nasional sangat besar tetapi terkadang tidak sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional.



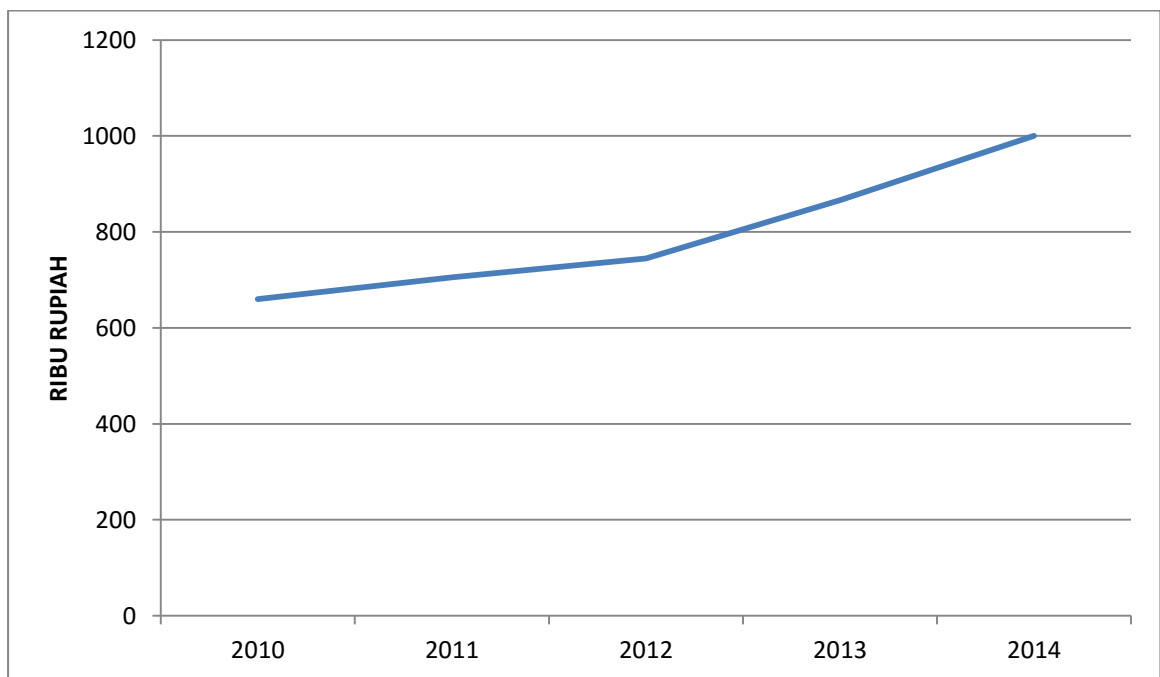
Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur

Gambar 1.1 Keadaan PDRB di Jawa Timur tahun 2010-2013

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa PDRB yang ada di Jawa Timur pada tahun 2010-2013 selalu mengalami kenaikan. Dimana PDRB pada tahun 2010 yaitu sebesar 990,65 triliun kemudian naik pada tahun 2011 menjadi 1120,5 triliun dan naik lagi pada tahun 2012 sebesar 1248,8 triliun dan pada tahun 2013 naik menjadi 1382,5 triliun. Kenaikan PDRB dapat menyebabkan kenaikan pada jumlah tenaga kerja yang tersedia, baik dari segi permintaan maupun penawaran, sehingga dampak dari kenaikan ini adalah banyaknya jumlah penduduk yang berdatangan ke wilayah dengan PDRB tertinggi. Hal tersebut jelas terjadi karena PDRB menunjukkan kesejahteraan atau kemajuan suatu ekonomi pada wilayah tersebut.

PDRB merupakan indikator penting untuk mengetahui suatu potensi yang ada di wilayah tersebut, dengan asumsi demikian dapat dikatakan bahwa PDRB merupakan acuan bagi pengusaha untuk melihat potensi dalam membangun usahanya, sementara dari sisi tenaga kerja PDRB dapat dilihat sebagai suatu potensi untuk kemajuan karir serta peningkatan upah yang akan diberikan oleh pengusaha atas balas jasa dari apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut.

Di berbagai negara maju maupun negara berkembang, kebijakan penetapan upah minimum sangat penting untuk mengatasi salah satu dari masalah ketenagakerjaan. Pengertian upah yang dirumuskan pada pasal 30 ayat 1 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.



Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Timur

Gambar 1.2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur pada tahun 2010 sampai tahun 2014. Upah minimum provinsi belum ditetapkan secara musyawarah, melainkan ditetapkan berdasar kan upah minimum kabupaten/kota yang terkecil. Pada tahun 2010 upah minimum kabupaten/kota terkecil ada di kota pacitan dengan total 660.000 sedangkan pada tahun 2011 upah terkecil di Jawa Timur juga ada di kabupaten pacitan yaitu sebesar 705.000, untuk tahun 2012 upah terkecil ada di kabupaten trenggalek dan pacitan dengan nominal 750.000 sedangkan untuk tahun 2013 dan tahun 2014 upah terkecil masih dipegang pacitan dengan nominal 866.250 dan 1.000.000

Upah minimum yang ada di Jawa Timur selalu mengalami kenaikan, tentu ini menjadi hal positif bagi para pekerja dari sisi tenaga kerja dan usaha dari sisi pengusaha, karena dengan upah yang tinggi pekerja akan mendapatkan uang lebih sedangkan dari sisi pengusaha upah akan menjadi indikator persyaratan bagi pekerja untuk memperoleh jasa lebih dari produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja. Ketentuan kenaikan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) per tahun tidak dapat disamaratakan, karena bergantung dari sejumlah indikator, terutama tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja di daerah masing-masing.

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur dapat diamati dari dua aspek, yaitu aspek persediaan dan aspek kebutuhan, idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, sehingga tidak ada pengangguran. Tetapi dari tahun ke tahun kondisi normal yang diharapkan tersebut belum pernah terjadi, jumlah pengangguran setiap tahunnya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga keseimbangan atas lapangan pekerjaan dan juga jumlah penduduk sangat tidak signifikan sehingga terjadinya banyak pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan.

Besarnya penyediaan tenaga kerja dalam masyarakat merupakan banyaknya orang yang dapat menawarkan suatu jasanya untuk melakukan proses produksi.

Beberapa diantara mereka bahkan ada yang sudah cukup aktif untuk kegiatannya yang dapat menghasilkan barang maupun jasa. Mereka dapat dikatakan sebagai golongan yang bekerja, sebagian yang lain dikategorikan sebagai siap bekerja, dan sedang berupaya mencari pekerjaan, mereka dikatakan pencari kerja atau pengangguran. Jumlah yang bekerja dan pencari kerja dapat dikatakan sebagai angkatan kerja. (Wilaga & Suliswanto, 2018).

Tabel 1.1

Keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur tahun 2010-2014

Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Bekerja
2010	28.268.825	19.527.051	8.741.774	189.68.108
2011	28.440.153	19.761.886	8.678.267	18.940.340
2012	29.088.183	20.238.054	8.850.129	19.411.256
2013	29.282.929	20.432.453	8.850.476	19.553.910
2014	29.578.682	20.149.998	9.428.684	19.306.508

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, penduduk usia kerja selalu mengalami kenaikan hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2010 penduduk usia kerja sebesar 28,2 juta orang, sedangkan pada tahun 2014 penduduk usia kerja naik menjadi 29,5 juta orang, tentu kenaikan tersebut tidak lepas dari tingginya laju pertumbuhan penduduk yang ada.

Penduduk yang bekerja memiliki kenaikan pada tahun 2010 hingga tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 terjadi penurunan pada jumlah orang yang bekerja, hal ini terjadi karena berbagai macam faktor ekonomi. Salah satunya adalah inflasi, PDRB, jumlah penduduk, investasi dan indikator pembangunan ekonomi lainnya. Kenaikan jumlah angkatan kerja paling banyak terjadi pada tahun 2011 ke 2012 sebesar 648.030 ribu jiwa, yang awalnya dari 29.440.153 juta jiwa naik menjadu 29.088.183 juta jiwa hal tersebut juga berdampak pada tingginya jumlah angkatan kerja pada saat itu, dimana tahun 2011 sebesar 19.761.886 juta jiwa naik menjadi 20.238.054 juta jiwa, hal tersebut

sangat berpengaruh dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja yang semakin sedikit dikarenakan banyaknya penawaran tenaga kerja. Tentu akan menciptakan pengangguran yang lebih signifikan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Adanya sektor formal yang tidak mampu memenuhi dan menyerap angkatan kerja yang terus meningkat disebabkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dengan lapangan pekerjaan yang tersedia (Sadhana, 2013).

1.2 Ringkasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Upah Minimum Kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada di Jawa Timur. Data pada penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan antara time series dan cross section, sedangkan tahun yang digunakan yaitu tahun 2010 sampai tahun 2014.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah PDRB berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ?
2. Apakah upah minimum kabupaten/kota berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ?

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh dari PDRB dan upah minimum kabupaten/kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur tahun 2010-2014

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi dan untuk menganalisis pengaruh dari PDRB dan Upah minimum Kabupaten dan Kota terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan sumber referensi untuk menganalisis jauh lebih dalam mengenai sub tema yang sama.

3. Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Di dalam pedahuluan , akan menguraikan mengenai latar belakang mengenai gambaran umum tentang terbentuknya penelitian. Selain itu, pada bab ini juga berisikan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian teori-teori dari para teoritis dan praktisi terdahulu tentang pengetahuan yang terkait dalam penelitian. Definisi – definisi atau pengertian yang terkait dengan penelitian akan dijelaskan di dalam bab dua. Bab ini menjelaskan pula hipotesis penelitian, model analisis dan kerangka berfikir.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan segala aspek yang diperlukan untuk membuat penelitian menjadi utuh. Bab ini mencakup beberapa aspek, antara lain, pembahasan tentang pendekatan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, identifikasi variabel, definisi operasional masing-masing variabel, jenis dan sumber data, pengumpulan data, prosedur penentuan sampel serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil-hasil yang telah dilakukan oleh peneliti serta pembahasan melalui analisis dan pengolahan informasi yang diperoleh berdasarkan metode

penelitian yang telah ditetapkan dan mengacu pada tinjauan pustaka yang relevan.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang simpulan dan saran yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dan menjawab berdasarkan hasil analisis